

PENERTIBAN PARIWISATA DI KAWASAN WISATA SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARAT

(Suatu Analisis Pengukuran Penertiban Secara Humanis dengan Rasch Model)

Oleh

Dwi Putri Yuliani^{1*}, Lalu Satria Utama², Syaefullah³, Abdul Rahman⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Perlindungan Masyarakat, Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ^{1*}dwi Putriyuliani07@gmail.com, ²satriabideko@gmail.com

Article History:

Received: 23-03-2024

Revised: 20-04-2024

Accepted: 26-04-2024

Keywords:

Penertiban, Kawasan Wisata, Senggigi, Rasch Model

Abstract: Permasalahn pokok penelitian ini adalah ada pada indikasi bahwa kondisi Kawasan wisata Senggigi sampai saat ini belum optimal pemerintah daerah dalam mengembangkan Kawasan wisata pantai, Tujuan Penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis penertiban pariwisata di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam penertiban pariwisata di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat dan Menganalisis model penertiban pariwisata di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan Metode menggunakan teknik Rasch Model. Hasil penelitian menunjukkan Keamanan publik di kawasan wisata Senggigi: perlu sinergitas antara pemerintah masyarakat pelaku usaha dan masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal penyiapan keamanan, amenitis di lokasi kawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung keamanan dan ketertiban pariwisata kawasan Senggigi : Keberadaan aturan: aturan yang diterapkan pada tata kelola pariwisata sudah cocok dengan kondisi masyarakat setempat, Pemberian Sanksi. Humanokrasi: harus ada strategi, inovasi dan pelibatan seluruh stakeholder pariwisata.

PENDAHULUAN

Desa Senggigi letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan tempat-tempat wisata lainnya. Letak seperti ini akan menarik jika dikemas menjadi produk perjalanan wisata. Objek wisata yang berdekatan dengan Senggigi di antaranya adalah Pantai Kerandangan. Objek ini selalu ramai dikunjungi wisatawan karena pantainya yang indah. Pengembangan pariwisata yang ideal akan selalu menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal. Berbicara mengenai pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat sangat penting

untuk membuka lapangan kerja, memberikan pemahaman tentang pariwisata, dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakatnya, mengutip pengertian pariwisata dari blog pariwisata sumatera utara yaitu: "Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* terdiri dari beberapa poin penting. Namun, konsep ini dapat disimpulkan sebagai pengembangan yang bertanggung-jawab (*responsible tourism*) baik terhadap lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi agar dapat terus terjaga dengan cara melibatkan peran wisatawan, *stakeholder* serta masyarakat lokal." (Pariwisata Sumut 2019)

Kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian dari saudara awal kasian yang telah melakukan kajian pada Kawasan wisata Senggigi, yang hasilnya menyebutkan bahwa: Studi ini menunjukkan bahwa ada perlunya keterlibatan pemerintah dalam membangun lembaga pengelolaan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur fasilitas wisata yang masih kurang, serta membentuk kerja sama yang erat antara pemangku kepentingan pariwisata termasuk masyarakat (Kasian 2019:1)

Dari pernyataan diatas mengindikasikan bahwa kondisi Kawasan wisata Senggigi sampai saat ini belum optimal pemerintah daerah dalam mengembangkan Kawasan wisata pantai tersebut, sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap hasil penelitian dari saudara awal kasian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penertiban Pariwisata Di Kawasan Wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat?
2. Apakah hambatan dalam penertiban pariwisata di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat?
3. Bagaimanakah model penertiban pariwisata di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat?

LANDASAN TEORI

Teori Fungsi Pengaturan Untuk Menjamin Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kajian pemerintahan dalam sudut pandang ilmu pengetahuan terbatas jika melihat pada perkembangannya. Hal ini dikarenakan letak ilmu pemerintahan yang sifatnya masih transisional (bersifat transisi) dari kajian ilmu hukum dan politik sehingga dalam mengidentifikasi dirinya secara tegas, ilmu pemerintahan masih terkesan mengalami kesulitan (Labolo, 2014). Secara umum ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji tentang pemerintah sebagai subjek penyelenggara pemerintahan, kegiatan pemerintahan itu sendiri serta komponen-komponen pembentuk unsur pemerintahan.

Istilah pemerintah menurut Finer dalam Kuper, memiliki empat cakupan definisi yaitu; pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, pemerintah merujuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan berlangsung, pemerintah sebagai subjek yang menduduki suatu jabatan sebagai pelaksana kekuasaan, serta pemerintah mengacu pada metode atau sistem pemerintahan di lingkup masyarakat. Sementara itu istilah pemerintahan lebih merujuk pada pelaksanaan kegiatan kekuasaan dalam berbagai ranah publik (Labolo, 2014).

Salah satu cakupan dari ilmu pemerintahan adalah bidang perlindungan masyarakat.

Bidang linmas menjadi sesuatu yang memiliki urgensi yang penting untuk dipelajari dan dilaksanakan sebab perlindungan terhadap warga negara merupakan tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Rasyid dalam buku Memahami Ilmu Pemerintahan menyebutkan secara umum pemerintahan memiliki empat fungsi, yaitu; fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan fungsi pembangunan (Labolo, 2014).

Fungsi pengaturan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan masyarakat sebab fungsi ini dapat dijadikan sebagai alat atau sarana dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga pada akhirnya akan terwujudnya keadaan yang aman, tentram dan kondusif dalam tatanan sosial di kehidupan masyarakat. Dengan demikian tugas negara sudah meluas menjadi misalnya melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar atau hak asasi manusia, yang selanjutnya berkembang menjadi fungsi perlindungan.

Fungsi Perlindungan Masyarakat

Pemerintahan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adanya perlindungan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, serta rasa aman pada masyarakat. Hal tersebut merupakan fungsi yang paling mendasar dalam pemerintahan karena terlaksananya perlindungan masyarakat adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi agar kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan (Nurcholis, 2005).

Dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta seluruh komponen bangsa. Rasa aman dan tentram adalah suatu hal yang diinginkan setiap orang. Untuk menghadirkan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus menciptakan sistem pengendalian ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat (Tramtibmas) yang tanggap akan persoalan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana tentram dan tertib benar-benar terwujud.

Fungsi perlindungan masyarakat tersebut dirinci dalam bidang-bidang yang mencakup kegiatan-kegiatan bidang:

- 1) Menghadirkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian, tentara dan polisi pamong praja;
- 2) Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari berbagai macam tindak kejahatan yang bisa terjadi;
- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana alam; dan
- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran.

Untuk dapat menciptakan sistem pengendalian tramtibmas maka diperlukan pengembangan kemampuan aparaturnya keamanan (Polri, TNI, Pol PP dan satuan lainnya) yang profesional membantu, memiliki mental melayani serta dilengkapi oleh fasilitas, sarana prasarana dan teknologi yang memadai (Nurcholis, 2005).

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas merupakan cara yang

dilakukan pemerintah melalui berbagai upaya untuk menjaga masyarakat dari banyak masalah yang terjadi. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh permasalahan sosial, bencana dan lain sebagainya. Untuk dapat mengatasi hal tersebut maka diperlukan linmas untuk mendukung penanganan bencana sehingga bisa mengurangi dan memperkecil dampak dari bencana yang terjadi, membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Linmas juga memiliki peran dalam mendukung aktivitas sosial dalam masyarakat, membantu pengamanan ketika pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 1 ayat (8) Permendagri No. 26/2020). Kemudian penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala daerah dan kepala desa dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) (Pasal 1 ayat (9) Permendagri No. 26/2020).

Konsep Pemerintahan Humanistik dalam Fungsi Perlindungan Masyarakat

Pada dasarnya perwujudan fungsi-fungsi pemerintahan, setidaknya diperlukan instrument pemerintahan, baik dalam bentuk dukungan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan substansi dan esensi pengaturannya, agar dapat mencerminkan kepastian pelaksanaan fungsi-fungsi. Juga diperlukan dukungan sumber daya, sarana/prasarana secara standar (walau tidak harus berlebihan), budaya organisasi yang akomodatif dan solutif. Itulah sebenarnya yang diidealkan Max Weber dengan tipe idealnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap diperlukan penyesuaian pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dari pengungkapan perlunya pemerintahan sebagai pihak pengatur dan perlindungan, pelayanan dan pembangunan, serta koordinasi, perlu legalisasi, instrument pemerintahan, hirarki perundang-undangan dan reformasi birokrasi. Artinya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut haruslah berbasis nilai-nilai yang bersifat konstitutif, pemerintahan sebagai seni dalam mewujudkan fungsi-fungsi pemerintahan diperlukan adaptasi penyesuaian kondisional dan moralitas etik, selain bersifat legalistik. Praktik tersebut ditransformasikan secara normatif menjadi pemerintahan legalistik-humanistik (Jeddawi, dkk., 2021).

Nilai-Nilai Konstitutif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik

Penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan (*humanism*). Sudah lama penyelenggaraan pemerintahan mendapat gugatan serius terkait dengan aspek metodologis dan juga kontribusi etikanya. Secara metodologis praktik penyelenggaraan pemerintahan masih berjalan tertatih-tatih menjawab persoalan kemanusiaan. Bekerja keras namun tidak mampu membuahkan lompatan-lompatan yang fantastis dan luar biasa sebagai solusi terhadap masalah-masalah penting kemanusiaan. Terkait dengan kontribusi praktik dan etik, sampai dengan saat ini aparatur pemerintah di Indonesia masih saja memiliki tingkat profesionalisme yang rendah, kemampuan pelayanan yang belum optimal, tingginya penyalahgunaan wewenang (korupsi), tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak terkait dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan disiplin pegawai (Rahman & Bakri, 2018).

Menurut Jimly Assidhique (2004), pemerintahan legalistik dan humanistik senantiasa berpijak kepada pemerintahan yang bermoral dan beretika. Pemerintahan humanistik senantiasa mengedepankan: 1) budaya organisasi yang *Integrity* (integritas),

incorruptibility (tidak dapat disuap/tidak korupsi), *meritocracy* (berdasar bakat dan kemampuan/prestasi), *market* (orientasi pasar yang berkeadilan), *pragmatism* (mudah menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada soal ideologi), termasuk juga di dalamnya aktivitas negara (*state activism*), rencana dan tujuan jangka panjang (*long term*), kebijakan yang sesuai kehendak masyarakat (*relevance*), pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*), bijaksana (*prudence*), dan mandiri (*self-reliance*) (Rahman & Bakri, 2018). 2) berlandaskan kemampuan Organisasi Pemerintah yang dinamis: misalnya seperti *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (mengkaji ulang): dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara/organisasi lain yang maju dan sehat). 3) Organisasi yang sehat yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengatasi perubahan dan terus berfungsi dengan budaya tempat kerja yang berkinerja tinggi (Alper, 2021).

Kebijakan Publik dalam Sektor Kepariwisata : Amanat Menjalankan Fungsi Kesejahteraan

Interdependensi dan interpenetrasi dalam era globalisasi telah melahirkan dua tantangan besar bagi eksistensi dan praktik pengelolaan negara (Madu, dkk., 2010). Interdependensi merujuk kepada kondisi dimana keberhasilan pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan sumber daya domestik. Artinya, negara dalam menjalankan misalnya fungsi kesejahteraan menjadi amat tergantung kepada sumber daya yang dimiliki negara lain. Sedangkan interpenetrasi merujuk kepada proses dimana negara tidak bisa lagi mengelola urusan-urusan domestik tanpa memperhatikan dinamika internasional dan sebaliknya. Di satu pihak, pemerintah, masyarakat negara lain dan kekuatan-kekuatan global secara langsung maupun tidak langsung dapat ikut menentukan agenda hukum, politik ekonomi domestik suatu negara. Di pihak lain, kebijakan-kebijakan internal suatu negara dapat membawa konsekuensi sosial, politik dan ekonomi bagi masyarakat negara lain.

Salah satu tantangan yang lahir dari meningkatnya interdependensi dan interpretasi global adalah pengelolaan sektor kepariwisataan. Eksistensi dan intensitas pergerakan barang dan jasa, orang dan berkembangnya jaringan sosial yang bersifat lintas batas menuntut pola manajemen baru dalam menangani sektor kepariwisataan. Dalam pola manajemen baru ini, kapasitas dan tanggungjawab pengelolaan sektor kepariwisataan lebih terdesentralisasi dan bertumpu pada sebuah *network of governance* yang melibatkan pemangku kepentingan yang beragam termasuk kepentingan masyarakat luar negeri, juga menyangkut kesiapan domestik pada sektor-sektor lainnya.

Mengingat karakteristik interdependensi dan interpenetrasi yang tinggi dalam pengembangan kebijakan publik sektor kepariwisataan, maka dalam fungsi koordinasi, negara menjalankan program pembangunan kepariwisataan yang dijalin antar berbagai sektor dalam kerangka pengembangan terpadu yang memberikan nilai manfaat yang besar dalam jangka panjang, baik dalam penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan ekonomi rakyat, maupun konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini sekaligus sebagai amanat untuk menjalankan fungsi kesejahteraan masyarakat domestik.

Fungsi koordinasi antar sektor yang bersumber pada prinsip *borderless tourism* yang melibatkan pergerakan orang, melintasi daerah negara dan perbatasan nasional, maka pengembangan lintas sektor harus mengacu pada standar kualitas dan layanan yang berlaku

dan disepakati bersama untuk mendukung visi dan misi kepariwisataan nasional dan internasional. Karena itu penyelenggaraan kegiatan pariwisata internasional harus ada perjanjian antar negara untuk menjamin hak-hak para wisatawan yang melakukan perjalanan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian non-eksperimen. Penelitian kuantitatif dalam kajian ini digunakan untuk mengukur persepsi/opini/sikap responden kemudian diubah menjadi angka untuk kemudian dianalisis dengan persamaan matematik, demikian Cooper and Schindler (2014). Jenis penelitian non-eksperimen merupakan penelitian yang didasarkan atas perbedaan secara alami (variasi) yang terjadi pada variabel bebas, demikian Sumintono dan Widhiarso (2014). Berdasarkan pada judul penelitian, aspek-aspek yang akan diukur meliputi aspek penertiban humanis dan pariwisata berkelanjutan Kawasan Wisata Senggigi.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti (Cooper dan Schindler, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh entitas pelaku pariwisata Kawasan Senggigi. Sedangkan sampel merupakan elemen bagian dari populasi yang sifatnya representative (Cooper dan Schindler, 2014). Roscoe (1975) dalam buku Sekarang dan Bougie (2013) mengusulkan aturan dalam penentuan ukuran sampel yakni lebih dari 30 dan kurang dari 500 untuk sebagian besar penelitian pada umumnya dalam penelitian *mutivariate* (termasuk analisis regresi berganda). Sedangkan menurut Linacre (Sumintono & Widhiarso, 2014) sampel yang representative berdasarkan ketelitian pengukuran variable latent minimal adalah 250 orang.

Pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara *Stratified Random Sampling*, dimana peneliti mencoba melakukan klaster sampel dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- 2) Pemerintah Kecamatan Batu Layar, Pemerintah Desa Batu Layar dan Senggigi.
- 3) Lembaga-lembaga pegiat wisata (BPPD, ASITA, PHRI dan lain-lain)
- 4) Pelaku wisata (pemilik hotel/restaurant, guide, pedagang lokal/asongan, pokdarwis)
- 5) Masyarakat setempat, nelayan, dan wisatawan lokal/mancanegara

Oleh karena itu dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak minimal 250 orang yang diambil secara proporsional dari masing-masing klaster. Pengambilan sampel populasi dilakukan secara acak namun sesuai dengan kemudahan peneliti atau *convenience sampling*. Malhotra (2017) mendefinisikan *convenient random sampling* sebagai upaya untuk memperoleh sampel penelitian dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam mengakses data, misalnya yaitu dengan cara mendatangi responden di satu acara tertentu, ataupun dibagikan secara elektronik melalui media sosial.

Menurut Sumintono dan Widhiarso (2014), bahwa sampel yang baik ditandai dengan pengelompokan person dan item pada strata kelompok yang berbeda dapat diketahui dari nilai separation dengan persamaan:

$$H = \frac{[(4 \times \text{SEPARATION}) + 1]}{3}$$

Makin besar nilai separation minimal untuk person adalah dua kelompok dan untuk item adalah tiga kelompok, maka kualitas instrumen dalam hal keseluruhan responden dan item semakin bagus, karena bisa mengidentifikasi kelompok responden dan kelompok item yang sifatnya representatif.

Instrumen dan Alat Pengukuran

Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan berbagai butir (*item*) pada aspek penertiban pariwisata secara humanis dan aspek pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu penertiban pariwisata secara humanis selaku variabel bebas (X), dan pariwisata berkelanjutan selaku variabel terikat (Y).

Pada variabel bebas Penertiban Pariwisata secara humanis adalah proses menciptakan ketertiban/keteraturan dengan memperhatikan nilai-nilai manusia atau hakiki manusia. Sehingga penertiban humanis dapat dilihat dengan memperhatikan koridor teori atau konsep dari Jimly Assidiqi (2004), meliputi *Integrity, incorruptibility, market, meritocracy, pragmatism, state activism, stability, self-reliance*. Dan nilai-nilai humanokrasi yang disarankan oleh Gary Hamel, Michele Zanini (2020), meliputi: *the power of ownership, the power of market, the power of meritocracy, the power of community, the power of openness, the power of experimentation*, dan *the power of paradox*.

Sementara variabel terikat pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Sehingga pariwisata berkelanjutan dapat dilihat dari sub variabel meliputi *Community Based Tourism, Public Private Partnership, Branding Tourism* pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan Kawasan Wisata Senggigi. Pengukuran variabel terikat dilakukan pada tiap kelompok aktor pentahelix (pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, Swasta, NGO/LSM, TNI/Polri, dan Media), tanpa adanya perlakuan sama sekali, namun peneliti masih dapat melakukan pengukuran atau observasi sesuai dengan tujuan penelitiannya.

Konseptualisasi konstruk ukur Penertiban secara Humanis meliputi 23 (dua puluh tiga) indikator. Konseptualisasi konstruk ukur pengembangan pariwisata berkelanjutan meliputi 10 (sepuluh) indikator. Setiap indikator akan diukur paling tidak oleh 3-4 item, untuk memastikan kemampuan pengukuran yang lebih baik di tiap indikatornya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) uji validitas, yaitu validitas isi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat mencakup pertanyaan penyelidikan yang memadai sebagai panduan ketika melakukan penelitian dan validitas konstruk yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian berdasarkan teori dan instrumen pengukuran yang digunakan, demikian Cooper dan Schindler (2014).

Uji Realibilitas. Reliabilitas berkaitan dengan akurasi dan presisi dari sebuah prosedur pengukuran, demikian Cooper dan Schindler (2014). Keandalan (*reliability*) suatu

pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Menurut Sumintono dan Widhiarso (2014), bahwa nilai person reliability dan item reliability adalah: < 0,67: Lemah; 0,67-0,80: Cukup; 0,81-0,90: Bagus; 0,91-0,94: Bagus sekali; >0,94: Istimewa.

Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya Sugiyono (2017:137). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner ditambah dengan observasi dan interview. Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Sebaliknya pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan ratio, adalah bentuk pertanyaan tertutup Sugiyono (2017:143).

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh seorang yang melakukan suatu penelitian guna mengukur suatu fenomena yang telah terjadi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu daftar pernyataan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minimum skor 1 dan maksimum skor 4, dikarenakan akan diketahui secara pasti jawaban responden, apakah cenderung kepada jawaban yang setuju maupun yang tidak setuju. Sehingga hasil jawaban responden diharapkan lebih relevan, Sugiyono (2014:58).

Tabel 2. Skor Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Kurang Setuju (KS)	2
3	Cukup Setuju (SR)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Pengumpulan data dimulai dari April - Mei 2023. Pengumpulan data dari berbagai pihak yang melakukan pengelolaan pariwisata dan pelaku pariwisata di Kawasan Senggigi, Karena penelitian ini melibatkan masyarakat di sekitar Kawasan Wisata Senggigi secara umum, maka proses penilaian data yang melibatkan responden majemuk diukur dengan

Model RASCH Many-Facets dari Sumintono dan Widhiarso (2014) dengan persamaan berikut:

$$P_{nikj} = \frac{e^{(\beta_n - \delta_i - F_k - C_j)}}{1 + e^{(\beta_n - \delta_i - F_k - C_j)}}$$

P_{nikj} (fungsi kemampuan responden)
 β_n (tingkat kesulitan aitem)
 δ_i (tingkat kesulitan ambang)
 C_j (ketajaman penilai)

Menurut dari Sumintono dan Widhiarso (2014) bahwa instrumen yang menggunakan skala pemeringkatan seperti skala likerts menggunakan persamaan model skala pemeringkatan sebagai berikut:

$$P_{ni} (X=1 / \beta_n, \delta_i, F_1) = \frac{e^{(\beta - [\delta + F])}}{1 + e^{(\beta - [\delta + F])}}$$

P_{ni} (probabilitas responden n)
 β (tingkat kesulitan aitem)
 δ (tingkat kesulitan ambang)
 F_1 (tingkat kesulitan ambang tingkat)

Metode Analisis Data

Menganalisis aspek pengelolaan pariwisata, penertiban pariwisata dengan pendekatan *humanocracy* mempengaruhi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Wisata Senggigi melalui pendekatan struktural dan dialogis dilakukan dengan permodelan RASCH yang akan menggunakan software Winsteps. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu: Pertama ialah melakukan uji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator, langkah ini dapat disebut sebagai uji *measurement model*. Kedua adalah melakukan uji *inferensial statistik* yang bertujuan untuk mengetahui ada kekuatan hubungan antar variabel/korelasi antara konstruk-konstruk yang diukur dengan menggunakan data person logit dari permodelan RASCH dengan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Instrumen Tentang Penertiban Pariwisata Kawasan Senggigi

Uji Validitas

Menguji validitas menggunakan pemodelan rasch, maka validitas isi dilakukan di tingkat item dengan merujuk pada nilai outfit meansquare (Outfit MNsQ) yang nilai idealnya adalah 1, dengan rentang yang dibolehkan ada di antara 0,5 sampai 1,5. Sedangkan untuk validitas konstruk menggunakan nilai raw variance (nilai minimal adalah 20%), dan nilai *unexplained variance* (harus lebih kecil dari 15%). Analisis Output dengan Rasch Model menunjukkan:

TABLE 3.1 D:\Riset\Akademisi\IPDN NTB\Satria\Dat ZOU129WS.TXTi Sep 22 2023

15:47rn

INPUT: 121 Person 39 Item REPORTED: 121 Person 39 Item 5 CATS WINSTEPS 4.4.7

SUMMARY OF 121 MEASURED Person

	TOTAL		MODEL		INFIT	OUTFIT			
	SCORE	COUNT	MEASURE	S.E.		MNSQ	ZSTD	MNSQ	ZSTD
MEAN	137.1	38.9	.61	.20	1.01	-.59	1.01	-.58	
SEM	2.1	.0	.08	.00	.07	.30	.07	.30	
PSD	22.5	.3	.87	.03	.77	3.26	.77	3.24	
S.SD	22.6	.3	.88	.03	.78	3.28	.77	3.26	
MAX.	185.0	39.0	3.36	.35	4.75	9.06	4.69	9.07	
MIN.	64.0	37.0	-1.94	.17	.08	-8.13	.08	-8.00	

REAL RMSE	.23	TRUE SD	.84	SEPARATION	3.60	Person RELIABILITY	.93		
MODEL RMSE	.21	TRUE SD	.85	SEPARATION	4.13	Person RELIABILITY	.94		
S.E. OF Person MEAN = .08									

Person RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = .99

CRONBACH ALPHA (KR-20) Person RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .95 SEM = 5.05

Nilai *outfit meansquare (Outfit MNSQ)* atas penertiban pariwisata Senggigi menunjukkan pada 1,01 yang berarti memenuhi syarat validitas dengan bagus sekali.

Uji Realibilitas

Reliabilitas berkaitan dengan akurasi dan presisi dari sebuah prosedur pengukuran, demikian Cooper dan Schindler (2014). Keandalan (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Menurut Sumintono dan Widhiarso (2014), bahwa nilai alpha cronbach adalah mengukur reliabilitas yaitu interaksiantara person dan aitem secara keseluruhan, yaitu:

.... < 0,50: Buruk;

0,50-0,60: Jelek;

0,60-0,70: Cukup;

0,70-0,80: Bagus;

.... >0,80: Bagus Sekali

Uji realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach's alpha > dari 0,60 (Nugroho, 2005: 65). Hasil Uji realibilitas dapat dilihat pada nilai cronbach's alpha pada table measured person. Analisis output dapat dilihat sebagai berikut:

SUMMARY OF 121 MEASURED Person

	TOTAL		MODEL		INFIT	OUTFIT			
	SCORE	COUNT	MEASURE		S.E.	MNSQ	ZSTD	MNSQ	ZSTD
MEAN	137.1	38.9	.61	.20	1.01	-.59	1.01	-.58	

SEM	2.1	.0	.08	.00	.07	.30	.07	.30	
PSD	22.5	.3	.87	.03	.77	3.26	.77	3.24	
S.SD	22.6	.3	.88	.03	.78	3.28	.77	3.26	
MAX.	185.0	39.0	3.36	.35	4.75	9.06	4.69	9.07	
MIN.	64.0	37.0	-1.94	.17	.08	-8.13	.08	-8.00	

REAL RMSE	.23	TRUE SD	.84	SEPARATION	3.60	Person	RELIABILITY	.93	
MODEL RMSE	.21	TRUE SD	.85	SEPARATION	4.13	Person	RELIABILITY	.94	
S.E. OF Person	MEAN = .08								

Person RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = .99

CRONBACH ALPHA (KR-20) Person RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .95 SEM = 5.05

Nilai cronbach's alpha sebesar 0,95. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk aitem pertanyaan yang merupakan variabel penertiban pariwisata Senggigi adalah reliabel. Ini maknanya bahwa responden yang memberikan data sebanyak 121 orang itu telah memberikan data yang bagus sekali.

Aitemnya pun reliabel sebesar 0,85, dengan output sebagai berikut:

SUMMARY OF 39 MEASURED Item

	TOTAL		MODEL	INFIT	OUTFIT					
	SCORE	COUNT	MEASURE	S.E.	MNSQ	ZSTD	MNSQ	ZSTD		

MEAN	425.3	120.8	.00	.11	1.00	-.37	1.01	-.31		
SEM	4.0	.1	.05	.00	.07	.51	.08	.52		
PSD	24.5	.4	.32	.00	.44	3.12	.47	3.24		
S.SD	24.8	.5	.32	.00	.45	3.16	.48	3.28		
MAX.	474.0	121.0	.65	.12	2.09	6.67	2.25	7.57		
MIN.	373.0	119.0	-.66	.11	.49	-4.96	.50	-4.84		

REAL RMSE	.12	TRUE SD	.29	SEPARATION	2.38	Item	RELIABILITY	.85		
MODEL RMSE	.11	TRUE SD	.30	SEPARATION	2.61	Item	RELIABILITY	.87		
S.E. OF Item	MEAN = .05									

Item RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00

Global statistics: please see Table 44.

UMEAN=.0000 USCALE=1.0000

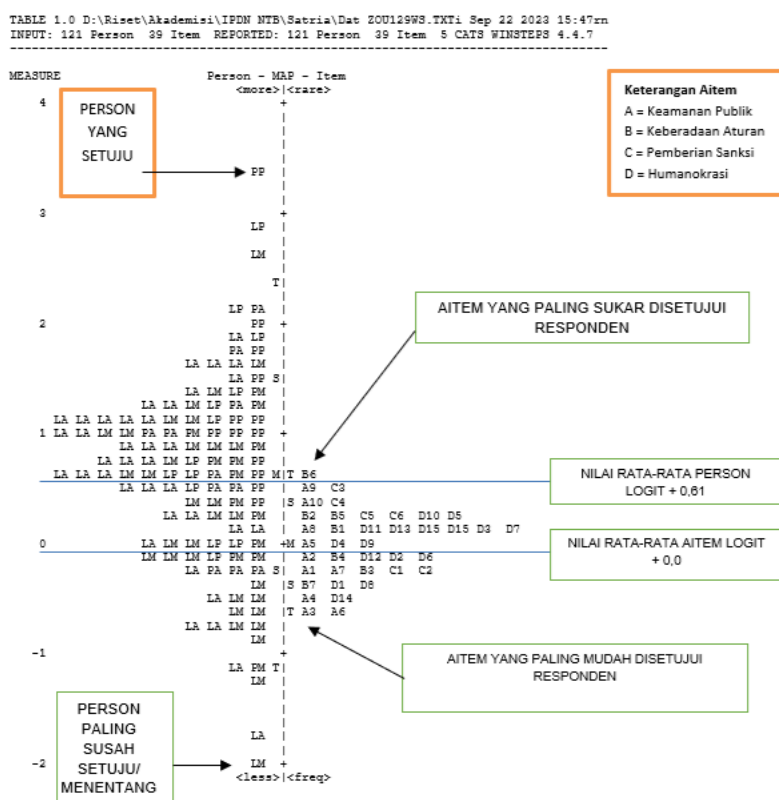
Dengan demikian baik data person maupun data aitem reliabel untuk dianalisis.

Uji Kualitas Instrumen

Pada Rasch model tidak diperlukan uji linieritas karena data ordinalnya ditransformasi dengan probabilitas dan logaritma menjadi logit yang sifatnya sudah berupa data interval. Dengan data interval Rasch Model mendapatkan kualitas pengukuran yang akurat dan presisi dengan bisa menjelaskan tingkat kesulitan item lebih informatif. Sebaran tingkat kesulitan aitem berdasarkan indikator/konstruk. Outputnya adalah:

	KEAMANAN PUBLIK	KEBERADAAN ATURAN	PEMBERIAN SANKSI	HUMANOKRASI
SANGAT SUSAH	A9, A10	B6	C3, C4	-
SUSAH	A8, A5	B5, B2, B1	C5, C6	D10, D5, D11, D13, D15, D16, D7, D9, D4
MUDAH	A2, A7, A1	B4, B3	C2, C1	D6, D2, S12
SANGAT MUDAH	A4, A6, A3	B7		D8, D1, D14

Analisis output dapat dilihat sebagai berikut:



Measure = nilai logit aitem, untuk aitem B6 dengan + 0,65 logit menunjukkan ini adalah aitem yang paling sukar disetujui oleh responden dalam instrumen penertiban pariwisata yang diberikan; sedangkan aitem A3 dengan nilai - 0,66 logit merupakan aitem yang paling mudah disetujui.

TABLE 13.1 D:\Riset\Akademisi\IPDN NTB\Satria\Da ZOU129WS.TXTI Sep 22 2023

15:47prn

INPUT: 121 Person 39 Item REPORTED: 121 Person 39 Item 5 CATS WINSTEPS 4.4.7

Person: REAL SEP: 3.60 REL.: .93 ... Item: REAL SEP: 2.38 REL.: .85

Item STATISTICS: MEASURE ORDER

ENTRY	TOTAL	TOTAL	MODEL	INFIT	OUTFIT	PTMEASUR-AL	EXACT MATCH
NUMBER	SCORE	COUNT	MEASURE	S.E.	MNSQ	ZSTD	MNSQ ZSTD
EXP%	Item						

16	373	121	.65	.11	2.00	6.42	2.25	7.57	-.05	.60	30.6	42.8	B6
20	385	121	.51	.11	.82	-1.48	.83	-1.41	.65	.59	52.1	43.8	C3
9	388	121	.47	.11	2.05	6.60	2.25	7.45	.07	.59	37.2	44.2	A9
21	398	121	.36	.11	.78	-1.86	.80	-1.70	.66	.59	57.9	44.5	C4
10	401	121	.32	.11	2.09	6.67	2.23	7.31	.02	.59	40.5	44.9	A10

KEAMANAN
PUBLIK

15	402	121	.31	.11	.70	-2.58	.73	-2.33	.64	.59	56.2	45.0	B5
33	402	121	.31	.11	.69	-2.74	.68	-2.81	.80	.59	50.4	45.0	D10
12	403	121	.30	.11	.72	-2.39	.72	-2.37	.73	.59	53.7	45.0	B2
22	404	121	.28	.11	1.77	5.01	1.85	5.43	.05	.59	41.3	45.1	C5
23	402	120	.26	.11	.63	-3.34	.64	-3.18	.78	.59	59.2	45.3	C6
28	410	121	.21	.11	.77	-1.98	.77	-1.96	.72	.58	53.7	45.6	D5
34	410	120	.19	.11	.74	-2.24	.76	-1.98	.66	.58	60.8	46.2	D11
36	412	121	.19	.11	.49	-4.96	.50	-4.84	.82	.58	65.3	46.1	D13
38	412	121	.19	.11	.78	-1.83	.75	-2.12	.71	.58	61.2	46.1	D15
11	413	121	.17	.11	.68	-2.82	.69	-2.69	.70	.58	52.9	46.2	B1
39	415	121	.15	.11	.52	-4.58	.52	-4.58	.79	.58	63.6	46.3	D15
8	416	121	.14	.11	.71	-2.49	.74	-2.20	.65	.58	57.0	46.3	A8
30	413	120	.14	.11	.83	-1.35	.93	-.53	.63	.58	61.7	46.4	D7
26	421	121	.07	.11	.61	-3.53	.60	-3.64	.76	.58	66.1	47.1	D3
32	422	121	.06	.11	.56	-4.04	.57	-3.91	.81	.58	63.6	47.2	D9
27	423	121	.05	.11	.78	-1.77	.80	-1.66	.72	.58	51.2	47.3	D4
5	423	120	.00	.11	.95	-.33	.91	-.64	.63	.58	55.0	47.7	A5

KEBERADAAN
ATURAN

2	432	121	-.07	.11	.70	-2.53	.72	-2.39	.68	.57	57.0	48.4	A2
29	435	121	-.11	.11	.78	-1.78	.77	-1.91	.71	.57	65.3	48.8	D6
25	437	121	-.13	.12	1.17	1.31	1.14	1.10	.65	.57	41.3	48.8	D2
14	438	121	-.15	.12	.71	-2.48	.70	-2.54	.74	.57	56.2	48.9	B4
35	439	121	-.16	.12	.68	-2.69	.67	-2.82	.79	.57	62.0	48.9	D12
7	442	121	-.20	.12	1.19	1.42	1.15	1.17	.59	.57	47.1	49.2	A7
19	439	119	-.24	.12	1.83	5.12	1.82	5.06	.10	.55	43.7	49.5	C2
13	445	121	-.24	.12	.88	-.88	.89	-.87	.63	.57	57.0	49.5	B3
1	446	121	-.25	.12	.84	-1.24	.83	-1.36	.65	.56	57.9	49.5	A1

PEMBERIAN
SANKSI

18	450	121	-.31	.12	1.07	.57	1.05	.38	.40	.56	61.2	49.8	C1
----	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------	------	----

31	452	120	-.39	.12	1.30	2.12	1.24	1.71	.61	.56	41.7	50.0	D8
17	459	121	-.44	.12	1.79	4.92	1.72	4.58	.15	.56	38.8	50.0	B7
24	459	121	-.44	.12	.99	-.02	1.06	.49	.68	.56	55.4	50.0	D1
37	460	121	-.45	.12	1.02	.19	.97	-.19	.62	.55	52.1	50.0	D14
4	463	121	-.50	.12	1.29	2.02	1.21	1.51	.59	.55	49.6	50.3	A4
6	469	121	-.58	.12	1.06	.49	1.08	.63	.37	.55	55.4	50.7	A6
3	474	121	-.66	.12	1.08	.62	1.01	.10	.48	.54	50.4	51.1	A3

HUMANOKRASI

MEAN	425.3	120.8	.00	.11	1.00	-.4	1.01	-.3			53.4	47.4
PSD	24.5	.4	.32	.00	.44	3.1	.47	3.2			8.6	2.2

Uji Unidimensionalitas

Unidimensionalitas instrument adalah ukuran yang penting untuk mengevaluasi apakah instrument yang dikembangkan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, dalam hal ini adalah konstruk penertiban pariwisata. Analisis model Rasch menggunakan analisis komponen utama (*Principal Component Analysis*) dari residual, yaitu mengukur sejauh mana keragaman dari instrument mengukur apa yang seharusnya diukur.

TABLE 23.0 D:\Riset\Akademisi\IPDN NTB\Satria\Da ZOU129WS.TXTI Sep 22 2023

15:47prn

INPUT: 121 Person 39 Item REPORTED: 121 Person 39 Item 5 CATS WINSTEPS 4.4.7

Table of STANDARDIZED RESIDUAL variance in Eigenvalue units = Item information units

	Eigenvalue	Observed	Expected
Total raw variance in observations =	61.5970	100.0%	100.0%
Raw variance explained by measures =	22.5970	36.7%	36.8%
Raw variance explained by persons =	10.1374	16.5%	16.5%
Raw Variance explained by items =	12.4595	20.2%	20.3%
Raw unexplained variance (total) =	39.0000	63.3%	100.0%
Unexplnd variance in 1st contrast =	6.4365	10.4%	16.5%
Unexplnd variance in 2nd contrast =	2.8374	4.6%	7.3%
Unexplnd variance in 3rd contrast =	2.4310	3.9%	6.2%
Unexplnd variance in 4th contrast =	2.1364	3.5%	5.5%
Unexplnd variance in 5th contrast =	1.9672	3.2%	5.0%

Dari tabel tersebut, terlihat hasil pengukuran raw variance data adalah sebesar 36,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan unidimensionalitas minimal sebesar 20 % dapat terpenuhi; apa bila nilainya lebih 40% artinya lebih bagus; apa lagi bila lebih dari 60 % artinya istimewa. Hal lain, yaitu varians yang tidak dapat dijelaskan oleh instrumen idealnya tidak melebihi 15 % (terdapat 1 buah yang diatas 10 %, yaitu 10, 4 %; sedangkan

yang lain di bawah 10%.

Analisis Skala Peringkat (*Right Scale Analysis*)

Analisis Skala Peringkat adalah responden yang paling banyak setuju. Output ditunjukkan sebagai berikut:

TABLE 3.2 D:\Riset\Akademisi\IPDN NTB\Satria\Dat ZOU129WS.TXTi Sep 22 2023

15:47rn

INPUT: 121 Person 39 Item REPORTED: 121 Person 39 Item 5 CATS WINSTEPS 4.4.7

SUMMARY OF CATEGORY STRUCTURE. Model="R"

CATEGORY		OBSERVED		OBSVD		SAMPLE		INFIT		OUTFIT		ANDRICH		CATEGORY
LABEL	SCORE	COUNT	%	AVRGE		EXPECT		MNSQ	MNSQ	THRESHOLD		MEASURE		
-----+-----+-----++-----+-----														
1	1	192	4	-.88	-.84	.97	1.11	NONE		(-2.91)		1		
2	2	521	11	-.13	-.22	1.10	1.16	-1.52		-1.37		2		
3	3	1341	28	.25	.35	.77	.76	-.88		-.20		3		
4	4	1960	42	.94	.86	.78	.81	.23		1.31		4		
5	5	698	15	1.37	1.44	1.25	1.16	2.17		(3.37)		5		
-----+-----+-----++-----+-----														
MISSING		7	0	.10										

Pada tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata observasi dimulai dari logit - 0,88 untuk pilihan skor 1 (yaitu sangat tidak setuju). Kemudian pilihan dengan skor 2 (tidak setuju) sebesar - 0,13 logit dan meningkat ke logit 1,37 untuk pilihan skor 5 (sangat setuju). Terlihat antara pilihan 1 dan 2 tidak terjadi kenaikan nilai logit, namun menurun yang menunjukkan responden tidak bisa memastikan pilihan 1 (sangat tidak setuju) atau 2 (tidak setuju). OBSERVED AVERAGE is mean of measures in category. It is not a parameter estimate.

CATEGORY	STRUCTURE	SCORE-TO-MEASURE					50% CUM.			COHERENCE		ESTIM
LABEL	MEASURE	S.E.	AT CAT.		---ZONE---		PROBABLT		M->C	C->M	RMSR	DISCR
-----+-----+-----+-----+-----												
1	NONE	(-2.91)	-INF	-2.18			15%	1%	1.5620		1	
2	-1.52	.08	-1.37	-2.18	-.78	-1.87	31%	20%	1.1724	1.04	2	
3	-.88	.05	-.20	-.78	.47	-.80	50%	59%	.5595	.92	3	
4	.23	.03	1.31	.47	2.46	.37	57%	79%	.4631	1.18	4	
5	2.17	.04	(3.37)	2.46	+INF	2.29	73%	12%	1.1927	.93	5	

M->C = Does Measure imply Category?

C->M = Does Category imply Measure?

KESIMPULAN

- a. Keamanan publik di kawasan wisata Senggigi: perlu sinergitas antara pemerintah masyarakat pelaku usaha dan masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal penyiapan keamanan, amenitis di lokasi kawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung keamanan dan ketertiban pariwisata kawasan Senggigi
- b. Keberadaan aturan: aturan yang diterapkan pada tata kelola pariwisata sudah cocok dengan kondisi masyarakat setempat, namun perlu perbaikan dalam beberapa hal, misalnya: teknik penertiban mengharuskan memperhatikan aspek pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Senggigi, sudah diupayakan oleh Pemda Lombok Barat melalui berbagai pembinaan baik dalam bentuk pemberian bantuan dan pelatihan, akan tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kawasan Senggigi dan belum menganggap penting keberadaan penertipan pariwisata Senggigi.
- c. Pemberian Sanksi. Masih terdapat pelanggaran terhadap batas ROI Pantai dan peruntukan penggunaan lahan.
- d. Humanokrasi: harus ada strategi, inovasi dan pelibatan seluruh stakeholder pariwisata. Strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam menjadikan Wisata Senggigi tertib yaitu: Akselerasi Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Wisata Senggigi, Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community Based Tourism*) Pengembangan Kemitraan Masyarakat dan Swasta (*Public Private Partnership*) dan Penciptaan Tourism Branding Destination.

SARAN

- a. Guna mewujudkan Wisata Senggigi yang tertib, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program pengembangan yang sudah direncanakan dengan baik. Selain itu rekomendasi dan saran perbaikan dari ahli pariwisata dapat ditindaklanjuti tanpa adanya tindak lanjut maka Wisata Senggigi tidak akan dapat menjadi pariwisata andalan sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat selama ini.
- b. Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi salah satu penentu keberhasilan pengembangan pariwisata, oleh sebab itu upaya untuk memberdayakan masyarakat di Kawasan Senggigi, seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan bersifat merata dan menyeluruh khususnya dalam hal peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
- c. Pengembangan wisata diarahkan pada pengembangan yang berbasis komunitas (*Community Based Tourism*) dimana terjalin sinergitas yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Wisata Senggigi.
- d. Penciptaan Tourism Branding menjadi suatu hal yang perlu diupayakan oleh pemerintah, melalui brand destinasi Wisata Senggigi dapat menjadi salah satu penertipan pariwisata yang memiliki keunggulan dan daya tarik tinggi bagi wisatawan.

- e. Implementasi dari strategi penertiban pariwisata Senggigi melalui program dan kegiatan akan mendukung terwujudnya Wisata Senggigi yang aman dan tertib, diperlukan goodwill dan tekad dalam mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anboll, Simon, 2007 *Competitif Identity The New Brand Management for Natios, Cities, and Regions USA*: Palgrave Macmillan.
- [2] Archer, Brian, Cooper, Chris, dan Ruhanen, Lisa, 2005. The positive and negative impacts of tourism. Dalam Theobald, William. F. Editor. *Global tourism*, Edisi ketiga. Amsterdam: Elsevier. Hal. 79-102.
- [3] Ardahaey, Fateme Tohid 2011 Economic impacts of tourism. *International Journal of Business and Management*, Vol. 6 No. 8. Hal 206-215
- [4] Anando, Valdo (2015). *Destination Branding Kepulauan Seribu: Studi Kano Destination Branding Kepulauan Seribu Dalam Upaya Mengembangkan Destinasi Wisata Bahari Internasional Yogyakarta:UGM-Ilmu Komunikasi (S1)*.
- [6] Bambang Sunaryo "Kebijakan Pembangunan Destinasi Yogyakarta, 2013 hlm 86-87 "Gava Media
- [7] Bramwell, Bill. 2004. Partnerships, participation, and social science research in tourism planning. Dalam Lew, Alan. A., Hall, C. Michael, dan Williams, Allan. M. Editor. *A companion to tourism* Malden: Blackwell, Hal. 541-554
- [8] Buckley, Ralf 2010. *Conservation tourism*. Wallingford: CABI
- [9] Bungin, Burhan. (2015). *Komunikasi Pariwisata (Pemasaran Dan Brand Destinasi)*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [10] Caffyn, Alison. 2000. *Developing sustainable tourism in the Trossachs*, an Kualitatif 10 Langkah Penelitian Kualitatif : Pendekatan Konstuksi dan Fenomenologi. Malang Universitas Negeri Malang Press
- [11] Cooper, Chris, dan Hall, C. Michael. 2008. *Contemporary tourism, an international approach*. Oxford: Elsevier. Creswell, J. Wand Clark V L P. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research* Sage Publications.
- [12] Dahles. Heidi. 2000. *Tourism, small enterprises and community development*. Dalam Govers, Robert & Frank Go. 2009. *Place Branding*, UK: Palgrave Macmillan. Hlm 31.
- [13] De Araujo, L. Medeiros., dan Bramwell. Bill. 1999. Stakeholder assessment and collaborative tourism planning: The case of Brazil's Costa Dourada Project. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 7, No. 3&4, Hal. 356-378.
- [14] DPR-RI, Undang-Undang RI Tentang Kepariwisata (UU NO. 9 Tahun 1990). Jakarta: Ditjen Pariwisata. DPR-RI, Undang-undang yang baru Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- [15] Duncan, Christopher. R. 2007. Mixed outcomes: the impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Development and Change*, Vol. 38, No. 4, Hal. 711-733. parks and protected areas. *Journal of Sustainable Tourism* Vol. 17, Hal. 231-248.
- [16] Eagles, P.F.J. 2009, *Governance of recreation and tourism partnerships in Gelder*, Sicco Van. 2005. *Global Brand Strategy: Unlocking Brand Potential Across Countries*. Hlm 29-41

-
- [17] Hasan, Ali. (2015). Tourism Marketing. Yogyakarta: Penerbit CAPS Hatton, Michael,J, Community Based Tourism in Asia Pasific, Opec Publication, 2011
- [18] <https://djangki.wordpress.com/2016/11/11/berburu-air-terjun-cantik-di-merangin/>.
- [19] <https://martinis1960.wordpress.com/2014/05/24/geopark-merangin/>
- [20] <https://tirto.id/di-balik-membaiknya-daya-saing-pariwisata-indonesia>
- [21] Da Pujiningrum Palimbungan, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Di desa wisata tabalansu, papua pariwisata <https://ois.unud.ac.id/index.php/jump/article/view/41004>
- [22] 1 Nyoman Erawan "Pariwisata dan Pembangunan Denpasar, 1994 hlm. 25
- [23] Upada Sastra Indonesia Negara Mega Biodiversity di dunia 17 May 2010.
- [24] <http://lipi.go.id/berita-indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-5181>. Diakses 20/07/2018 Pkl 16.30 WIB
- [25] Jannah, Bidriatul, Arifin, Zainul & Andriani Kusumawati. Pengaruh City Branding dan City
- [26] Image Terhadap keputusan Berkunjung ke Banyuwangi. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 17 No. 1
- [27] Jumlah ke kunjungan wisman Indonesia Desember 2017, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan--.htm>. diakses 20/07/2018
- [28] Konsep Geopark, 30 Juli 2017. <http://geopark.meranginkab.go.id/berita-konsep-geopark.html>.
- [29] Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. Tanpa tahun. Manajemen Pemasaran Jilid 2 Edisi 13. Terjemahan oleh Bob Sabran. 2009. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [30] Moilanen, Teemu and Rainisto. 2009. How to Brand nations, cities, and destinations, a planning book for place branding. USA: Palgrave Macmillan
- [31] Nasikun dalam G. Sastrayuda, Strategi Pengembangan Resort dan leisure 2010 [file.upi.edu/.../GUMELAR S...KONSEP.....PEMBERDAYAAN](http://file.upi.edu/.../GUMELAR%20S...KONSEP%20PEMBERDAYAAN)
- [32] M. Nicolas Lumanauw "Sektor Pariwisata Jambi Masih Belum Dimanfaatkan
- [33] Dengan Baik dalam <https://www.optimativa.com/berita/sektor-pariwisata-jambi-masih-belum-dimanfaatkan-dengan-baik>. Pakarti, Swastika. Kusumawati, andriani, Mawardi, M. Kholid. 2017.
- [34] "Pengaruh City branding dan Event Pariwisata terhadap Keputusan Berkunjung serta
- [35] Dampaknya pada Minat Berkunjung Kembali Ke Kabupaten Banyuwangi Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), (online), Vol. 47 No.1 2017.
- [36] Pansiria, Jaloni, 2013 Collaboration and partnership in tourism: The experience of Botswana Tourism Planning & Development, Vol. 10, No. 1, Hal. 64-84.
- [37] Piter. Terras do Vouga e do Caramulo: dinamização do turismo em áreas de montanha. [S.l.: s.n.], 2005
- [38] Radiawan, Hari, et al. 1997. Pengembangan Jaringan Ekonomi di Kawasan Pariwisata (Suatu Studi Kasus di Kawasan Danau Toba, Sumatra Utara Jakarta: Depdikbud.
- [39] Richards, Greg, dan Hall, Derek. Editor. Tourism and sustainable community development. London: Routledge, Hal. 83-100. Editor. Tourism and sustainable

- community development. London: Routledge, Hal. 154-169.
- [40] Rinduwan, 2003. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta. Robert Christie Mill - Tourism The International Business Edisi Bahasa Indonesia PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2000 hlm. 226.
- [41] RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni sinergi kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan di sleman tanjung kabupaten <http://journal.stiaaan.ac.id/index.php/PRDM/article/view/44/37>
- [42] Sadat, Andi M. 2009. Brand Belief: Strategi Membangun Merek Berbasis Keyakinan. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 84
- [43] Schultz, Don. E and Barnes, Beth E. 1999, Strategic Brand Communication Campaigns. Lincolnwood, IL: NTC Business Book Setiawan, Putu Yudi, et.al, 2014. The Effect of e-Wom on Destination Image, Satisfaction and Loyalty. Intrenational Journal of Business and Managenet Invention. Vol.3 Issue 1. PP.22-99
- [44] Simanjuntak, Daniel Fransiscus, Dh, Ahmad Fauzi, & Irawan, Ari 2018. "Pengaruh Event
- [45] Pariwisata Terhadap Keputusan Berkunjung (Survei pada Wisatawan Domestik yang Berkunjung ke Event Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi)"Jurnal Administrasi dan
- [46] Bisnis (JAB) (Online), Vol. 61, No.3 2018.. Spencer & Spencer dalam Thoha dan Hutapea (2008:28), Scheyvens Regina Ecotourism and Empowerment of Local Communities dalam Tourism management, 2009,
- [47] Stronza, Amanda. 2008. Partnership for tourism development. Dalam Moscardo, Gianna. Editor. Building community capacity for tourism development. Wallingford: CABI. Hal. 101-115.
- [48] The Travel & Torism Competitiveness Report 2017. April 11, 2017 dalam <http://www.indecon.or.id/learning/english-the-travel-tourism-competitiveness-report-2017-2/> Tjiptono, Fandy. 2005. Brand Management & Strategy, Yogyakarta: Andi offset
- [49] Tuohino, Anja, dan Konu, Henna. 2014. Local stakeholders' view about destination management: who are leading tourism development? Tourism Review,
- [50] Tuohino, Anja, dan Konu, Henna. 2014. Local stakeholders' view about destination management: who are leading tourism development? Tourism Review, Vol. 69, No. 3, Hal. 202-215
- [51] www.kemenpar.go.id/..//LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016%20FINAL
- [52] Agung Yoga Asmoro dan Hery Sigit Cahyadi. 2022. "(PDF) Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Terhadap Metode, Topik, Dan Aplikasinya Pada Jurnal Pariwisata Indonesia." Retrieved March 1, 2023 (https://www.researchgate.net/publication/359742267_Pariwisata_Berkelanjutan_A_nalisis_terhadap_Metode_Topik_dan_Aplikasinya_pada_Jurnal_Pariwisata_Indonesia).
- [53] Cahyana, Ludhy. 2020. "Pantai Selong Belanak Destinasi Wisata Baru Di Lombok Tengah." Tempo. Retrieved March 5, 2023 (<https://travel.tempo.co/read/1306877/pantai-selong-belanak-destinasi-wisata-baru-di-lombok-tengah>).
- [54] Cooper and Schindler. P.S. (2014). Business Research Methods, McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
- [55] Dian Pertiwi. 2014. "Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan

- Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang"
<https://media.neliti.com/media/publications/31839-ID-pengawasan-terhadap-pedagang-kaki-lima-dalam-menertibkan-objek-wisata-pantaipuru.pdf>
- [56] Kasian, Awal. 2019. "Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Desa Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat." JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala 4. doi: 10.36312/jupe.v4i5.837.
- [57] Malhotra, Naresh. (2017). Marketing Research: An Applied Orientation, Pearson Education, Inc., New Jearsey
- [58] Pariwisata Sumut. 2019. "Pariwisata Berkelanjutan - Defensi, Indikator dan Contoh." Pariwisata Sumut. Retrieved March 11, 2023 (<https://www.pariwisatasumut.net/2019/03/pariwisata-berkelanjutan.html>).
- [59] radarlombok.co.id. 2017. "Penertiban Roi Pantai Gili Trawangan." January 26.
- [60] Saifuddin dan Titin Sulistiyani. 2020. "Startegi Pengembangan Wisata Pantai dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/download/1846/1638/8004>
- [61] Sekaran, U. and R. Bougie, (2013), Research methods for business, edisi 6, West Sussex: John Wiley and Son
- [62] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- [63] Sumintono, Bambang, dan Widhiarso, Wahyu, 2014. Aplikasi Model Rasch Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Trim Komunika, h. 8.
- [64] <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN